



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSUF
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 859674

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.292.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/216 m2 di KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 888 m2/96 m2 di KONAWE, HASIL SENDIRI Rp. 251.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
4. Tanah Seluas 8389 m2 di KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
5. Tanah Seluas 199 m2 di KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **155.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,5 G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **83.450.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **200.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **71.500.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 24.500.000

Sub Total

Rp. 1.627.150.000

III. HUTANG

Rp. 54.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.572.650.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.